BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pendidikan perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan, sebagai bagian dari penyempurnaan dan peningkatan mutu pendidikan.[2] Walaupun realitas selalu menunjukkan, setiap kali perubahan selalu mendatangkan berbagai tanggapan antara pro dan kontra, namun dalam praksisya hal ini menjadi suatu yang perlu dianalisis demi pengembangan pendidikan suatu bangsa.

Dalam perjalanan sejarahnya, sejak Indonesia merdeka 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan,[3] yakni kurikulum yang pertama lahir pada masa kemerdekaan adalah kurikulum 1947 disebut dengan kurikulum *rentjana pelajaran* 1947, kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1952 yang disebut dengan *rentjana pelajaran terurai* 1952.

Kurikulum 1952 diberlakukan kurang lebih 11 tahun, kemudian menjelang tahun 1964 pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum yang diberi nama *rentjana pendidikan* 1964, yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik

[2]Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm.113-119. Lihat juga, Dede Rosyda dan Wahdi Sayuthi, "Problematika Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah" Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, (Volume 5 Nomor 1 Januari –Maret 2007) hlm. 7

[3]Muh. Yamin, *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), hlm.92

untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program *pancawardana* yang meliputi perkembangan moral, inteligensi, emosional artistik, perkembangan *keprigelan* dan perkembangan jasmaniah.[4]

Setelah pergantian kekuasan dari orde lama menjadi orde baru, pada tahun 1968 dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari *Pancawardana* menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, moral, dan budi pekerti. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pada tahun 1975 pengaruh konsep manejemen yang sangat terkenal saat itu, yakni MBO *(management by objective)* merasuk ke dunia pendidikan kita, dan melahirkan kurikulum 1975 yang menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efesien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), masa ini dikenal dengan istilah *"satuan pelajaran",* yaitu satuan pelajaran disetiap satuan bahasan. Kurikulum 1975 ini disinyalir sebagai kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan proses dan prosedur, teori pengembangan kurikulum.[5]

---

[4]Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik.* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm.20

[5]S.Hamid Hasan.,"Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Idieologis dan Teoritik Pedagogi*s",* dikutip dari *www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/s_hamid_hasan.pdf pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016, Jam 08.45 WIB*

Hampir sepuluh tahun berjalan, pemerintah kemudian memberlakukan kurikulum baru dengan nama kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian dengan tetap mementingkan faktor tujuan. Kurikulum 1984 juga sering disebut "kurikulum 1975 yang disempurnakan". Pada kurikulum ini peserta didik harus memegang peran aktif dalam belajar dengan memperkenalkan ketrampilan proses hingga memiliki kemampuan dalam mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Aktive Learning (SAL).*[6] CBSA merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara langsung, beberapa ciri model pembelajaran ini adalah: (1) Pendekatan ketrampilan proses, (2) Belajar kelompok, (3) Pameran hasil kerja (4) Lingkungan sebagai sumber belajar.[7]

Perkembangan selanjutnya perubahan kurikulum menjadi tradisi sepuluh tahunan. Tahun 1994 pemerintah meresmikan kurikulum baru yang merupakan revisi terhadap kurikulum 1984. Kurikulum ini berupaya memadukan kurikulum sebelumnya, namun dalam perjalannanya ada beberapa kendala teknis dan subtantif dalam pelaksanaanya, antara lain: keterbatasan persepsi guru, kesulitan

[6]*Ibid.*

[7]Suharsimi Arikunto.,"Memacu Pelaksanaan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) Melalui Pelayanan Supervisi",*Jurnal Cakrawala Pendidikan* (Vol. 2, No. IV 1985), hlm. 21-27

guru dalam KBM sesuai kurikulum, rumusan materi GBPP kurang sistematis, dan materi belum sepenuhnya dapat diserap siswa.[8]

Tahun 2004 pemerintah mengganti kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004, kurikulum ini sering disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KBK setidaknya mengandung tiga unsur pokok, yaitu: (1) pemilihan kompetensi yang sesuai; (2) spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; dan (3) pengembangan pembelajaran. Kurikulum ini menekankan setiap mata pelajaran dirinci berdasarkan kompetensi apa yang dicapai siswa. Namun muncul berbagai persoalan, dimana sebagian besar guru belum memahami dan memililiki dokumen kompetensi, sehingga mereka kesulitan mengembangkan silabus, sistem pembelajaran, proses evaluasi dan target kompetensi.[9]

Seiring dengan perubahan pengelolaan pemerintah, yang memasuki era desentralisasi dan otonomi daerah, muncul berbagai wacana dibidang pendidikan, yang melahirkan perubahan pengelolaan pendidikan, berupa desentralisasi pendidikan, otonomi pendidikan, dan otonomi satuan pendidikan. Kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum 2004 yang sifatnya sentralistik, dianggap tidak sesuai lagi dengan zamanya, perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman, karena pada kenyataanya setiap peserta didik berbeda satu dengan yang

[8]Sukamto., "Evaluasi Kurikulum 1994 Menurut Persepsi Guru dan Siswa SMU", *Jurnal Ilmu Pendidikan,* (Jilid 7, No. 1, Februari 2000), hlm. 64

[9]Sutrisno.,"Probematika Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Mata Pelajaran Agama Islam di Sekolah*" Jurnal Pendidikan Agama Islam* (Vol. 1, No. 1 Mei – Oktober 2004), hlm 78

lain, berbeda pula antara satuan pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan yang lainya.[10] Maka pada tahun 2006 uji coba KBK dihentikan dan diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),[11] yang merupakan upaya pembaharuan atau penyesuaaian kurikulum yang didasarkan pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[12]

Pada kurikulum KTSP, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaianya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunanya menjadi tanggung jawab sekolah dibawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan daerah dan wilayah setempat.

Pada perkembangannya banyak pihak menganggap kurikulum ini terlalu memfokuskan atau menitikberatkan pada aspek kognitif, dimana peserta didik terlalu dibebani tugas-tugas materi pelajaran, sehingga tidak membentuk siswa

[10]Herry Widyastono, "Kemampuan Guru Dalam Menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan" *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (Vol. 18, No.3 September 2012), hlm. 245

[11]Lahirnya KTSP didasarkan pada diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP.19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai pengaturan pelaksanan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PP. 19/2005 tersebut mengatur tentang Kurikulum Pendidikan dan mengamanatkan bahwa kurikulum satuan pendidikan disusun oleh satuan pendidikan masing-masing.

[12]Aziz Mahfudin, "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Menengah Atas (SMA)", *Jurnal Allemania* (Vol. 2, No.2 Januari 2013), hlm. 153

memiliki pendidikan karakter,[13] tidak memiliki rangsangan untuk berfikir eksploratif, dan kritis. Akibatnya peserta didik tampak begitu santun disekolah, tetapi menjadi liar dan bringas diluar tembok sekolah. Mereka begitu gencar memburu ilmu dan prestasi akademik di sekolah, namun mereka mengenyampingkan ranah sikap spiritual dan sosialnya, pada akhirnya timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Kemunafikan merajalela, kejujuran dan kewajaran dikalahkan, keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang.[14]

Berangkat dari fenomena betapa pentingnya menumbuhkan sikap spritual, dan sosial dalam diri siswa ini, maka pemerintah melalui kemendikbud melakukan perubahan elemen kurikulum, dari KTSP menjadi kurikulum 2013. Prinsip implementasi kurikulum 2013 mengacu pada proses pembelajaran, dan bukan pada hasil pembelajaran, sehingga akan diketahui makna dari pembelajaran. Makna pembelajaran diharapkan menimbulkan perubahan watak (karakter), perubahan pembiasaan atau nilai, dan perubahan ilmu pengetahuan, mengemban amanah menuju standar nasional dan tujuan pendidikan nasional.

Diantara perubahan kurikulum tersebut diatas, perubahan KTSP menjadi kurikulum 2013 dapat dikatakan sebagai perubahan yang paling fenomenal, dimana banyak pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan kurikulum yang

[13]Murni Eva Marlina "Kurikulum 2013 Yang Berkarakter", *JUPIIS* (Vol. 5, No.2 Desember 2013), hlm. 28

[14]Putu Ariantini, I Nengah Suandi, dan I Made Sutama, "Implementasi Pengintegrasian Sikap Spiritual dan Sosial dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Kurikulum 2013 di Kelas VII SMP Negeri 1 Singaraja", *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesa Prodi Pendidikan Bahasa* (Volume. 3, Tahun 2014), hlm. 3

sudah dijalankan ke seluruh jenjang pendidikan pada tahun pelajaran 2014-2015 dihentikan oleh kemendikbud pada tanggal 5 Desember 2014.

Memang ada perubahan mendasar dari kurikulum 2013, diantara perubahan esensial dalam pelaksanaan kurikulum 2013 adalah: pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatana *scientific*, penilaian *berbasis otentik*, mengedepankan proses daripada hasil. Struktur kurikulum dimulai dari analisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL), kemudian menentukan Kompetensi Inti (KI.1, KI.2, KI.3,dan KI. 4), KI.1 berisikan kompetensi tentang *(religious)*, ketauhidan kepada maha pencipta, KI.2, berisikan tentang hubungan kemanusiaan *(Human relationship)*, KI.3 berisikan tentang Ilmu Pengetahuan *(knowledge)*, KI.4 berisikan tentang kompetensi ketrampilan *(skill).*[15] Lebih jelasnya perubahan paradigma kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut:[16]

[15]Subandi, "Pengembangan Kurikulum 2013 (Studi Analisis dan Subtantif Kebijakan Nasional)*"*, dikutip dari *http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/trmpl/article/view/331/268 pada hari Senin tanggal 26 September 2016, Jam 09.45 WIB*

[16]Daryanto, *Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013***,** (Yogyakarta, Gava Media, 2014) hlm. 8.

Tabel. 1.1
Perubahan Kurikulum dari KTSP ke K13

No	KBK 2004 dan KTSP 2006	Kurikulum 2013
1	Standar Kompetensi Kelulusan diturunkan dari Standar isi	Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari kebutuhan
2	Standar isi dirumuskan berdasarkan Tujuan Mata Pelajaran (Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran) yang dirinci menjadi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran	Standar isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi isi yang bebas mata pelajaran
3	Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk ketrampilan, dan pembentuk pengetahuan	Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan
4	Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran	Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai
5	Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah	Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas)
6	Kurikulum adalah bagian dari standar isi	Kurikulum adalah turunan dari SKL, SI, Proses dan Penilaian

Dengan adanya perubahan subtansial tersebut langkah awal yang dilakukan oleh pemererintah dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu melalui Pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diperuntukan bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru.[17] Kemudian kurikulum 2013 diberlakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014 melalui pelaksanaan terbatas, khususnya bagi sekolah-sekolah yang ditunjuk dan sudah siap melaksanakannya. Kemudian sesuai dengan Permendikbud No. 81 A tahun 2013 mewajibkan pelaksanaan kurikulum 2013 kesemua satuan pendidikan mulai tahun pelajaran 2014/2015.

Namun, dengan alasan berbeda-bedanya kesiapan sekolah, dan belum merata dan tuntasnya pelatihan guru, pada 5 Desember 2014 implementasi kurikulum 2013 yang diberlakukan keseluruh jenjang pendidikan pada tahun pelajaran 2014/2014 secara resmi dihentikan berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor: 179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014. Ada dua hal penting dari surat edaran tersebut, yaitu:

Menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015. Bagi sekolah yang baru menerapkan kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015, kembali menggunakan kurikulum 2006 mulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015.

[17]Kemendikbud, *Pedoman Kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah Dan Guru Inti,* (Jakarta: Pusbang Tendik: 2013) hlm.1

Sekolah yang telah tiga semester menerapkan Kurikulum 2013, yaitu sejak tahun pelajaran 2013/2015, yang merupakan sekolah pengembangan dan percontohan penerapan kurikulum 2013, maka sekolah tersebut tetap menerapkan Kurikulum 2013. Namun apabila sekolah tersebut keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan kurikulum 2013 dengan alasan ketidaksiapan dan demi kepentingan siswa, dapat mengajukan diri kepada kemendikbud untuk dikecualikan.[18]

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, SMKN 1 Bantul termasuk dalam kategori, sekolah pengembangan dan percontohan kurikulum 2013, sehingga sekolah tersebut tetap melaksanakan Kurikulum 2013 untuk semua level kelas. Di SMKN 1 Bantul sebagian besar guru telah diberi pelatihan dan workshop kurikulum 2013 diberbagai tingkat, baik ke LPMP, Kemenag, maupun dilaksanakan di sekolah. Namun tidak sedikit guru ketika melakukan tugasnya menemui problem yang berkaitan dengan pemahaman terhadap implmentasi kurikulum 2013. Hal ini terlihat ketika masing-masing guru dalam mengimplementasikan 2013 dengan berbagai model pembelajaran yang berbeda-beda, ada yang menggunakan materi kurikulum 2013 tetapi masih menggunakan model pembelajaran lama, bahkan masih ada yang memberikan materi dari

[18]Surat Earan Mendikbud Nomor: 179342/MPK/KR/2014, Perihal Pelaksanaan Kurikulum 2013, Tanggal 5 Desember 2014.

konten KTSP 2006, sebab materi-materi tersebut dianggap masih penting dan harus diberikan kepada siswa.[19]

Fenomena ini menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan implementasi kurikulum 2013, walaupun sudah banyak guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), tetapi banyak juga yang belum mampu memahami dalam persiapan dan implementasinya, karena dari beberapa sisi dan aspek, juga teori serta administrasi yang agak rumit. Disinilah sebenarnya menjadi peran strategis pengawas sekolah untuk dapat memonitor, membimbing, mengarahkan dan mengevaluasi guru dalam implementasi kurikulum 2013.[20]

Pengawas PAI yang merupakan bagian dari unsur pendidikan, mempunyai peranan penting dalam implementasi kurikulum 2013. Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Pada Sekolah, Bab III Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa pengawas PAI bertanggung jawab terhadap kualitas, perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran PAI. Dengan tanggung jawab yang besar ini, dalam pasal 5 ayat (4) pengawas PAI diberi wewenang: (1) memberikan masukan, saran, dan bimbingan penyususnan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada Kepala Sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/Kota; (2) membantu dan menilai

[19]Disarikan dari hasil Wawancara dengan Mustofa Guru Agama Islam, di SMK 1 Bantul pada tanggal 1 Juli 2016.

[20]Syahruddin, Sulton Djasmi, Irawan Suntoro, "Peran Pengawas Dalam Implementasi Kurikulum 2013 pada SMA Negeri di Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Sumberejo)" *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan.* dikutip dari *http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=314985pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, Jam 11.45 WIB*

kinerja Guru PAI serta merumuskan saran, tindak lanjut yang diberikan; (3) melakukan pembinaan terhadap Guru PAI; (4) memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas PAI kepada pejabat yang berwewenang; dan (5) memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan Guru PAI kepada Kepala Sekolah dan pejabat yang berwewenang.[21]

Dalam kaitanya dengan implementasi kurikulum 2013 ini, pengawas PAI memiliki tugas, mendampingi dan mendukung keberhasilan guru PAI untuk melaksanakan tugas implemetasi kurikulum 2013. Secara umum Pengawas memiliki tugas untuk melaksanakan supervisi akademik pada implementasi kurikulum 2013 dengan tiga fungsi yaitu: (1) Pembinaan Kurikulum untuk menjamin pencapaian Kurikulum 2013 dengan tepat, (2), Perbaikan proses pembelajaran dengan membantu guru merencanakan program akademis, dan (3) Pengembangan profesi dalam melaksanakan program pengajaran.[22]

Berdasarkan dari paparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan "Pendampingan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMKN 1 Bantul Yogyakarta." Penelitian ini menjadi urgen ketika pada tahun pelajaran 2016/2017 kurikulum 2013 diberlakukan secara serentak diseluruh jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat SD, SMP, sampai dengan tingkat SMA, sehingga apabila dalam

[21]Peratauran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Pada Sekolah.

[22]Departemen Agama RI, *Model-Model Pelatihan Bagi Pengawas Sekolah,* (Jakarta: Departemen Agama, 2005), hlm 86.

implementasi kurikulum 2013, sekolah-sekolah lain menemui problem yang sama, penelitian ini dapat dijadikan pijakan ataupun refrensi untuk mengantisipasinya.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini tidak melebar dan agar penelitian ini membuahkan hasil yang maksimal, maka penelitian ini akan difokuskan pada Pendampingan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMKN 1 Bantul Yogyakarta.

2. Pertanyaan Penelitian

   Dari fokus penelitian tersebut, beberapa pertanyaan yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah:

   a. Bagaimana implementasi Kurikulum 2013, pada Mata pelajaran PAI di SMKN 1 Bantul Yogyakarta?
   b. Problem apa saja yang dihadapi oleh guru PAI, di SMKN 1 Bantul Yogyakarta dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013?
   c. Bagaimana Pengawas mendampingi guru PAI, di SMKN 1 Bantul Yogyakarta dalam mengatasi problem implementasi Kurikulum 2013?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam:

a. Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata pelajaran PAI di SMKN 1 Bantul Yogyakarta.
b. Problematika yang dihadapi oleh guru PAI, di SMKN 1 Bantul Yogyakarta dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013.
c. Upaya pengawas dalam mendampingi guru PAI, di SMKN 1 Bantul Yogyakarta mengatasi problematika implementasi Kurikulum 2013.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan di bidang pendidikan, dan menjadi wawasan bagi guru dan pengawas dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya, serta menjadi bahan kajian dan referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013.

b. Manfaat secara praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan Kementerian Agama dalam mengambil kebijakan

dan pembinaan pada pengawas dan guru PAI yang terkait dengan implementasi kurikulum 2013.

2) Menjadi bahan masukan bagi pengawas dalam menjalankan fungsinya sebagai pembina dan pembimbing guru PAI.
3) Memberi kontribusi terhadap guru PAI dalam implementasi kurikulum 2013.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berusaha menggali Pendampingan Pengawas PAI dalam Implementasi Kurikulum 2013 untuk itu pada Bab I Pendahuluan penelitian ini diawali dengan mengungkapkan latar belakang permasalahan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan yang menjadi fokus dalam penelitian ini disertai dengan pertanyaan penelitiannya. Di bagian akhir bab ini disampaikan manfaat dan tujuan dilakukannya penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis.

Bab II berisi tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu berisi keterangan-keterangan hasil penelitian sejenis atau yang hampir sama yang sudah dilakukan sebelumnya, baik dari variabel penelitian maupun dari sisi metodenya. Kajian ini bertujuan untuk memposisikan penelitian ini diantara penelitian-penelitian terdahulu dan menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

Kemudian kerangka teori yang berisi kajian tentang teori yang relevan dengan penelitian ini, sehingga membentuk sebuah kerangka berfikir yang

menjadi landasan penulis menganalisis data dan menarik kesimpulan. Pembahasan diawali mengenai pengertian, Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013, dan peranan pengawas dan guru dalam implemntasi kurikulum 2013.

Pada bab berikutnya dijelaskan tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, dimana lokasi penelitian dilakukan, siapa yang menjadi informan penelitian ini kemudian menjelaskan teknik penentuan informannya serta teknik pengumpulan datanya. Di bagian akhir dijelaskan juga cara menguji keabsahan data dan teknik analisa datanya.

Bab IV merupakan sajian hasil penelitian yang diawali dengan pemaparan kondisi objektif lokasi penelitian dilanjutkan paparan hasil analisis data penelitian Pendampingan Pengawas PAI dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMKN 1 Bantul Yogyakarta.

Terakhir bab V Penutup. Di bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi terkait hasil penelitian.